

The Role of the Ganggangpanjang Village Government in the Development of Punden Mbah Retjo Tourism

[Peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam Pengembangan Wisata Punden Mbah Retjo]

Vera Ferdyana¹⁾, Eny Rustianingsih^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: enirustianingsih@umsida.ac.id

Abstract. *The development of Punden Mbah Retjo Tourism in Ganggangpanjang Village requires an active role from the village government in supporting tourism management and community participation. This study aims to describe and analyze the role of the Ganggangpanjang Village Government in the development of Punden Reco Tourism. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with informants selected using purposive sampling, including the Village Head, tourism managers, government agencies, local MSME actors, and the community involved in tourism management. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model through data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results showed that the village government performed roles as a facilitator through tourism facilities, village funding support, and destination planning; as a mobilizer through community participation, environmental cleanliness, and MSME development; and as a regulator through operational rules and supervision. The three roles have been implemented synergistically, although further optimization is needed in digital promotion, supporting facilities, and technology utilization.*

Keywords - Role Of Village Government; Facilitator; Mobilizer; Regulator; Village Tourism Development

Abstrak. *Pengembangan Wisata Punden Mbah Retjo di Desa Ganggangpanjang memerlukan peran aktif pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan wisata dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam pengembangan Wisata Punden Reco. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, meliputi kepala desa, pengelola wisata, perwakilan instansi pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan desa, dan perencanaan destinasi; sebagai mobilisator melalui peningkatan partisipasi masyarakat, kebersihan lingkungan, dan pengembangan UMKM; serta sebagai regulator melalui penetapan dan pengawasan aturan operasional wisata. Ketiga peran tersebut telah dilaksanakan secara sinergis, tetapi masih memerlukan optimalisasi pada aspek promosi digital, fasilitas pendukung, dan pemanfaatan teknologi.*

Kata Kunci - Peran Pemerintah Desa; Fasilitator; Mobilisator; Regulator; Pengembangan Wisata Desa

I. PENDAHULUAN

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya guna menjaga ketertiban serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik yang bertujuan mendukung pembangunan di wilayahnya. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perencana dan pengendali pembangunan yang memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting dalam pembangunan berbasis potensi lokal, di mana pemerintah dituntut mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, merupakan bagian dari strategi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.[1]

Pemerintah desa merupakan unit pemerintah terkecil di Indonesia.[2] Dimana pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengatur dan melayani masyarakat di tingkat lokal. Hal tersebut seperti amanat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintah terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.[3] Tugas dan fungsi dari adanya Pemerintah Desa diantaranya bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengkoordinasi, serta menggerakkan potensi wisata yang ada di wilayahnya [4]. Dimana

Peran ini mencakup pemberian dukungan modal, pelatihan kepada masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana, serta promosi destinasi wisata. Selain itu, pemerintah desa juga berfungsi sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan berbagai pihak terkait demi terciptanya sinergi dalam pengelolaan wisata.[2]

Selain itu, penguatan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini mengatur kriteria UMKM sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan, pemberdayaan, pengembangan usaha, penyediaan akses pembiayaan, serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang dalam lingkungan usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Pengelolaan desa wisata juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola aset, mengembangkan potensi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha, termasuk pengembangan desa wisata dan pemberdayaan UMKM.[4]

Pengembangan pariwisata pada tingkat desa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi lokal yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu desa.[5] Dalam konteks pembangunan desa, keberadaan destinasi wisata tidak hanya dipandang sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mengarahkan, memfasilitasi, menggerakkan, serta mengatur proses pengembangan wisata agar potensi yang dimiliki desa dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.[6] Peran tersebut menjadi semakin penting karena pengembangan wisata desa membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, kelompok pengelola, pelaku usaha, hingga pihak eksternal yang mendukung promosi dan pengembangan destinasi.[7]

Salah satu potensi wisata yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo adalah Wisata Punden Mbah Reco yang berada di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Punden Mbah Reco pada awalnya merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan religi bagi masyarakat setempat. Kawasan tersebut sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal sebagai destinasi wisata. Perkembangan Punden Mbah Reco mulai mendapatkan perhatian ketika Desa Ganggangpanjang mengikuti program SIDO Resik (Sidoresik) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut menjadi salah satu momentum awal dalam mendorong perubahan kawasan Punden Mbah Reco melalui kegiatan kebersihan, penataan lingkungan, dan pengembangan potensi lokal. Perubahan tersebut secara bertahap menjadikan kawasan yang sebelumnya kurang terawat menjadi kawasan yang mulai dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata berbasis potensi lokal.

Program Sidoresik kemudian menjadi salah satu momentum penting dalam perubahan wajah Punden Mbah Reco. Desa Ganggangpanjang menjadi salah satu peserta Sidoresik dan mengembangkan kawasan Punden Mbah Reco dengan melibatkan pemerintah, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media. Melalui keterlibatan berbagai unsur tersebut, kawasan yang sebelumnya identik dengan tempat yang dianggap mistis mulai diarahkan menjadi ruang terbuka dan destinasi wisata yang dapat dinikmati masyarakat. Perubahan tersebut dilakukan melalui kegiatan gotong royong, pembersihan kawasan, penataan lingkungan, perbaikan akses, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan Punden Mbah Reco tidak hanya berasal dari pembangunan fisik, tetapi juga dari perubahan cara masyarakat memandang dan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai ruang sosial, ekonomi, budaya, dan rekreasi.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang memiliki posisi penting sejak tahap awal pengembangan Punden Mbah Reco. Pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menyediakan pembangunan fisik, tetapi juga berperan dalam menginisiasi, mengoordinasikan, dan mendorong keterlibatan masyarakat.[8] Dalam proses pengembangan kawasan, masyarakat dilibatkan melalui kegiatan gotong royong, pengelolaan kebersihan, pengamanan kawasan, kegiatan kepemudaan, serta pengembangan usaha mikro di sekitar lokasi wisata. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Punden Mbah Reco diarahkan pada model wisata berbasis masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku yang ikut menjaga dan mengembangkan destinasi.

Dalam aspek ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa Ganggangpanjang memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menjalankan kegiatan usaha di kawasan wisata. Berdasarkan data lapangan yang telah dihimpun, terdapat lapak kuliner yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Ganggangpanjang. Terdapat 18 lapak kuliner telah berkembang di kawasan Punden Mbah Reco. Ketentuan bahwa pedagang berasal dari masyarakat Desa Ganggangpanjang menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk memastikan bahwa perkembangan wisata memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal.

Dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco, Pemerintah Desa Ganggangpanjang menjadi pihak yang memiliki peran utama dalam mengarahkan proses pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa memberikan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan pengembangan destinasi, pengalokasian anggaran desa, serta pengoordinasian berbagai pihak yang berkepentingan.[9] Sarana dan prasarana yang telah

dibangun atau disediakan antara lain perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata, toilet, mushola, gazebo, serta lapak yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Pemerintah desa juga memiliki rencana pengembangan jangka panjang berupa peta wisata desa dan papan informasi mengenai sejarah Punden Reco. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui perencanaan dan penyediaan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan destinasi wisata.[7]

Pembangunan infrastruktur tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari fungsi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan anggaran desa.[10] Salah satu bentuk peran pemerintah desa sebagai regulator sekaligus fasilitator adalah menetapkan arah pembangunan dan mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung kebutuhan pembangunan wisata sesuai dengan perencanaan desa. Dengan demikian, anggaran desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan yang bersifat administratif dan pelayanan dasar, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi dan wisata desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[10] Dukungan pendanaan melalui anggaran desa menjadi penting karena pengembangan destinasi wisata membutuhkan fasilitas dasar yang tidak selalu mampu dibangun hanya melalui swadaya masyarakat. Namun, peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah Desa Ganggangpanjang juga menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi dengan pihak eksternal, termasuk Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh pendampingan, dukungan program, pengembangan kapasitas, promosi, serta penguatan kelembagaan pengelola wisata.[11]

Pengembangan Punden Mbah Reco tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Ganggangpanjang melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi tersebut diperlukan karena pengembangan wisata memiliki aspek yang berbeda dan membutuhkan dukungan dari perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemerintah Desa Ganggangpanjang berperan sebagai pihak yang menginisiasi, mengelola, dan mengoordinasikan kebutuhan wisata di tingkat desa, sedangkan Dinas Pariwisata memberikan dukungan yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, promosi, monitoring, kerja sama, serta peningkatan kapasitas pengelola.[12] Sementara itu, Dinas PMD memberikan dukungan yang berkaitan dengan pendampingan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pemantauan, dan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya desa.

Peran Dinas Pariwisata dalam kolaborasi tersebut terlihat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan wisata, pemberian pelatihan sesuai kebutuhan pengelola, dukungan promosi melalui media resmi, serta kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan wisata. Dinas Pariwisata juga mendorong pemanfaatan potensi lokal, baik potensi alam maupun budaya, sebagai daya tarik destinasi.[9] Dengan demikian, keterlibatan Dinas Pariwisata tidak menggantikan peran pemerintah desa, tetapi memberikan dukungan teknis dan kepariwisataan agar pengembangan Punden Mbah Reco dapat lebih terarah.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo berperan dalam mendukung pemerintah desa melalui pendampingan, pemantauan, dan penguatan kelembagaan. Pendampingan dilakukan dalam kaitannya dengan penyusunan rencana pengembangan wisata dan keterlibatan dalam musyawarah desa.[13] Dalam aspek pemantauan, Dinas PMD memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program. Dinas PMD juga memiliki peran dalam menghubungkan pemerintah desa dengan program pemerintah yang dapat mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Pada aspek kelembagaan, Dinas PMD turut mendorong penguatan legalitas dan pendampingan yang berkelanjutan agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara lebih terorganisasi.

Kolaborasi antara Pemerintah Desa Ganggangpanjang, Dinas Pariwisata, dan Dinas PMD tersebut juga terlihat dalam upaya mengembangkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku wisata. Pemerintah desa memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat secara langsung, sedangkan Dinas Pariwisata memberikan dukungan dalam aspek pengembangan pariwisata dan Dinas PMD mendukung aspek pemberdayaan serta kelembagaan desa. Pembagian peran tersebut menjadi penting karena pengembangan wisata berbasis masyarakat membutuhkan keterpaduan antara pembangunan destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari keberadaan wisata, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi.[14]

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Punden Mbah Reco dapat dilihat dari kegiatan gotong royong, kebersihan, keamanan, pengelolaan fasilitas publik, serta pengembangan UMKM. Pemerintah Desa Ganggangpanjang juga mendorong pemuda desa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung keberlangsungan wisata. Pelaku UMKM memperoleh ruang melalui penyediaan lapak di kawasan wisata, sedangkan masyarakat dan pemuda terlibat dalam kegiatan operasional tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Dalam pengelolaannya, kelembagaan wisata juga menjadi bagian penting dari proses pengembangan Punden Mbah Reco. Pemerintah desa mendorong penguatan kelembagaan melalui BUMDes sebagai lembaga ekonomi

desa yang dapat mendukung pengelolaan potensi wisata. Pengelolaan wisata tetap membutuhkan keterlibatan masyarakat karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menjalankan berbagai aktivitas di kawasan wisata. Dengan demikian, BUMDes dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mendukung dalam pengelolaan wisata, di mana BUMDes dapat berfungsi sebagai kelembagaan pengelola, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana dan pelaku ekonomi di lapangan. Penguatan kelembagaan tersebut juga mendapat dukungan dari Dinas PMD melalui pendampingan dan penguatan legalitas kelembagaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan potensi lokal dan destinasi wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Khair, Kafrawi, dan Sarkawi (2022) bertujuan menganalisis pemanfaatan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset desa, pengembangan unit usaha produktif, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui BUMDes mampu meningkatkan pendapatan desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.[15] Selanjutnya, Karyana (2023) bertujuan menganalisis inovasi pemberdayaan BUMDes sebagai simpul penggerak ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis berbagai praktik pemberdayaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi usaha, pembinaan kelompok masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan mampu memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperluas daya saing produk lokal.[16] Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fazlin, Sopacua, dan Nahuaway (2024) yang bertujuan menganalisis peran otoritas lokal dalam promosi strategis Gua Laulawi sebagai destinasi wisata berbasis identitas budaya. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui pelestarian budaya, strategi promosi yang kreatif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisata tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.[17] Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada pengembangan BUMDes, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan strategi promosi destinasi wisata. Sementara itu, penelitian mengenai peran pemerintah desa berdasarkan dimensi fasilitator, mobilisator, dan regulator dalam pengembangan wisata religi berbasis potensi lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menganalisis peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam pengembangan Wisata Punden Reco menggunakan teori peran Edy Suhardono sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata.

Sebagai langkah strategis dalam mengukur tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan destinasi oleh pemerintah desa, dinamika arus kedatangan wisatawan menjadi indikator penting yang harus dikaji. Keberadaan data mengenai fluktuasi kunjungan ini sangat diperlukan untuk menganalisis kebutuhan kapasitas fasilitas umum, potensi pendapatan sektor riil bagi pelaku UMKM lokal, serta menentukan arah kebijakan promosi yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, dinamika perkembangan arus wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata ini disajikan secara kronologis melalui rincian data pergerakan pengunjung berkala dari tahun 2025 hingga periode berjalan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pengunjung Wisata Punden Reco Periode Januari 2025–Juli 2026

No.	Tahun	Bulan	Jumlah (Orang)
1	2025	Januari	3.200
2		Februari	2.100
3		Maret	1.500
4		April	7.800
5		Mei	3.500
6		Juni	4.200
7		Juli	5.500

8	Agustus	2.800
9	September	2.000
10	Oktober	1.850
11	November	1.900
12	Desember	4.100
13	Januari	3.500
14	2026 Februari	2.200
15	Maret	7.900
16	April	2.400
17	Mei	3.800
18	Juni	4.500
19	Juli	5.800
Total		70.550

Sumber: Data di peroleh dari pihak pengelolaan wisata Punden Mbah Retjo (2026).

Berdasarkan Tabel 1 di atas, fluktuasi angka kunjungan wisatawan di Punden Reco selama sembilan belas bulan terakhir memperlihatkan pola pergerakan berkala yang sangat dinamis, di mana pergeseran hari libur keagamaan dan agenda tradisi kebudayaan menjadi faktor penentu utama volume massa di lapangan. Sepanjang tahun 2025, titik tertinggi pergerakan wisatawan berada pada bulan April dengan total estimasi 7.800 orang karena bertepatan dengan libur panjang Lebaran, sedangkan memasuki tahun 2026 puncak kunjungan tersebut bergeser maju ke bulan Maret dengan capaian 7.900 orang akibat penyesuaian kalender Hijriah. Kehadiran agenda tahunan Grebeg Suro atau Bersih Desa yang diselenggarakan secara konsisten oleh pengelola pada setiap bulan Juli juga terbukti ampuh menarik kedatangan wisatawan secara massal, yang tercermin dari angka kunjungan sebesar 5.500 orang di tahun 2025 dan meningkat menjadi 5.800 orang pada tahun 2026. Melalui total akumulasi keseluruhan arus pelancong yang menyentuh angka 70.550 jiwa, pemerintah desa mendapatkan basis argumentasi empiris yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas promosi digital dan urgensi perluasan fasilitas penunjang guna memperkuat kemandirian ekonomi para pelaku UMKM setempat secara berkelanjutan.

Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat tiga permasalahan utama dalam pengembangan wisata Punden Reco di Desa Ganggangpanjang yang perlu segera mendapatkan perhatian. Pertama, promosi destinasi wisata masih belum maksimal, khususnya dalam pemanfaatan media digital. Platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube belum dikelola secara konsisten dan kreatif, sehingga informasi terkait daya tarik, sejarah, dan kegiatan wisata kurang tersebar luas. Akibatnya, minat wisatawan luar daerah masih rendah. Kedua, fasilitas pendukung wisata di sekitar Punden Reco belum sepenuhnya memadai. Area parkir terbatas, papan informasi minim, serta fasilitas penunjang seperti tempat istirahat, toilet, dan kios souvenir belum tertata dengan baik, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung. Ketiga, upaya Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam memobilisasi masyarakat melalui pembinaan, pendampingan, dan koordinasi secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Wisata Punden Reco semakin optimal.[12] Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengoptimalkan potensi wisata ini secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut relevan dengan teori peran Edy Suhardono yang membagi peran pemerintah ke dalam tiga bentuk, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator.[18] Peran fasilitator berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembangunan. Peran mobilisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat serta berbagai pihak agar berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sementara itu, peran regulator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menetapkan pedoman, aturan, dan melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pengembangan Wisata Punden Mbah Reco merupakan proses yang berawal dari pemanfaatan potensi lokal melalui momentum program Sidoresik dan kemudian berkembang melalui pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, keterlibatan pemuda, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi antara Pemerintah Desa Ganggangpanjang dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Dalam proses tersebut, pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator yang menghubungkan kepentingan pemerintah daerah, kelembagaan desa, pengelola wisata, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco berdasarkan teori peran Edy Suhardono yang meliputi peran sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator.[19]

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.[20] Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena mengenai peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam pengembangan Wisata Punden Reco berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan fokus pada pengembangan Wisata Punden Reco. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam pengembangan Wisata Punden Reco. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah desa, arsip, literatur ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan wisata desa.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan Wisata Punden Reco. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Ganggangpanjang, pengelola Wisata Punden Reco, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo, pelaku UMKM, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi objek penelitian dan aktivitas pengembangan wisata. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, dokumen administrasi, arsip, laporan, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian [18].

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dikondensasi dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data sesuai fokus penelitian. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan konsistensi berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori peran Edy Suhardono yang meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco dianalisis menggunakan teori peran Edy Suhardono (2016) yang membagi peran pemerintah ke dalam tiga bentuk, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator. Menurut Edy Suhardono, peran merupakan perilaku, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu posisi sesuai dengan hak yang dimilikinya serta dijalankan berdasarkan norma, aturan, dan harapan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, ketiga peran tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Desa Ganggangpanjang menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan fasilitas wisata, menggerakkan keterlibatan masyarakat, serta menetapkan dan mengawasi aturan dalam pengelolaan Wisata Punden Mbah Reco. Pembahasan masing-masing peran dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, data empiris, serta penelitian terdahulu.

A. Peran Pemerintahan Desa Sebagai Fasilitator

Menurut teori peran Edy Suhardono (2016), peran sebagai fasilitator merupakan bentuk peran pemerintah dalam memberikan fasilitas, dukungan, serta kemudahan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuan

pembangunan. Dalam konteks pengembangan Wisata Punden Mbah Reco, peran fasilitator Pemerintah Desa Ganggangpanjang dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana wisata, dukungan terhadap pengelolaan destinasi, komunikasi dengan masyarakat, serta perencanaan pengembangan wisata. Berdasarkan desain wawancara penelitian, aspek fasilitator diarahkan pada bagaimana pemerintah desa menyediakan fasilitas pendukung dan membangun komunikasi dengan masyarakat dalam pengembangan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung pengembangan Wisata Punden Mbah Reco. Fasilitas tersebut meliputi perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata, penyediaan tempat duduk bagi pengunjung, toilet umum, tempat bermain anak, mushola, serta penyediaan area parkir. Selain penyediaan fasilitas fisik, pemerintah desa juga memberikan ruang komunikasi kepada masyarakat melalui musyawarah untuk membahas program dan kebutuhan pengembangan wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan pemerintah desa tidak hanya berbentuk pembangunan fisik, tetapi juga mencakup dukungan komunikasi dan perencanaan pengembangan destinasi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Ganggangpanjang dalam wawancara:

“Pemerintahan desa sudah memberikan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur perbaikan jalan menuju lokasi wisata agar akses pengunjung menjadi lebih mudah. Selain itu bantuan pembangunan lain seperti tempat duduk dari bahan yang kuat dan tahan cuaca, menyediakan toilet umum, tempat bermain anak hingga pembangunan mushola.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Pengelola Wisata Punden Mbah Reco yang menyampaikan:

“Pemerintah desa banyak membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana. Misalnya pembangunan jalan menuju area wisata dan penyediaan tempat duduk untuk pengunjung. Selain itu, komunikasi dari pemerintah desa juga terbuka, kami sering diundang untuk musyawarah membahas program wisata yang akan datang.”

Berdasarkan hasil wawancara fasilitas dari pemerintahan desa juga dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat serta pihak eksternal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat dan pengelola memperoleh kesempatan untuk mengikuti musyawarah yang membahas program wisata. Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi tersebut penting karena masyarakat menjadi pihak yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan wisata. Selain itu, Pemerintah Desa juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh dukungan pengembangan kepariwisataan, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan pembangunan wisata di tingkat desa dengan dukungan dari pemerintah daerah. Gambar 1. Sarana dan Prasarana di Punden Mbah Reco(bentuk bangunan)sarpras.

Temuan tersebut diperkuat dengan dokumentasi kondisi sarana dan prasarana di kawasan Wisata Punden Mbah Reco sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Dokumentasi tersebut memperlihatkan bentuk fasilitas yang telah disediakan dalam mendukung aktivitas wisata, baik bagi pengunjung maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di kawasan wisata. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai fasilitator tidak hanya terlihat dari pernyataan informan, tetapi juga dapat diamati secara langsung melalui kondisi fasilitas yang tersedia di lapangan. Dengan demikian, dokumentasi ini menjadi bukti pendukung bahwa pemerintah desa telah memberikan fasilitasi secara nyata dalam menunjang kenyamanan pengunjung dan keberlangsungan aktivitas wisata.

Dukungan fasilitas tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data penelitian, jumlah kunjungan Wisata Punden Reco selama Januari 2025 sampai Juli 2026 mencapai 70.550 pengunjung. Jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada April 2025 sebanyak 7.800 orang, sedangkan pada Maret 2026 mencapai 7.900 orang. Pada pelaksanaan Grebeg Suro atau Bersih Desa, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 5.500 orang pada Juli 2025 dan meningkat menjadi 5.800 orang pada Juli 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas wisata perlu diikuti dengan penyediaan dan peningkatan fasilitas agar kapasitas destinasi mampu menyesuaikan dengan jumlah pengunjung.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Khair, Kafrawi, dan Sarkawi (2022) yang menunjukkan bahwa optimalisasi aset desa, pengembangan unit usaha produktif, dan penguatan partisipasi masyarakat melalui BUMDes dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini memperlihatkan bahwa fasilitasi Pemerintah Desa Ganggangpanjang tidak hanya diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi, tetapi juga diwujudkan melalui penyediaan fasilitas destinasi, akses wisata, fasilitas publik, perencanaan kawasan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut juga dapat dibandingkan dengan penelitian Fazlin, Sopacua, dan Nahuaway (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan destinasi berbasis identitas budaya membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui pelestarian budaya dan pengembangan destinasi. Penelitian ini menunjukkan bentuk yang lebih spesifik pada tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa Ganggangpanjang memfasilitasi pengembangan Punden Mbah Reco melalui pembangunan fasilitas dasar sekaligus merencanakan penyediaan informasi sejarah sebagai bagian dari penguatan identitas destinasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai fasilitator telah terlihat melalui penyediaan sarana dan prasarana, dukungan perencanaan, komunikasi dengan

masyarakat, pengalokasian dukungan pembangunan, serta koordinasi dengan pihak eksternal. Namun, peran tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya pada fasilitas pendukung dan pemanfaatan media digital untuk promosi, mengingat data kunjungan yang cukup besar menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus menyesuaikan kapasitas fasilitas dengan perkembangan aktivitas wisata.

Dengan demikian, berdasarkan teori Edy Suhardono (2016), peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai fasilitator telah diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, komunikasi dengan pengelola dan masyarakat, serta perencanaan pengembangan wisata. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah kunjungan menunjukkan bahwa fasilitas pendukung masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Selain itu, aspek promosi digital dan penyediaan informasi wisata masih perlu dioptimalkan agar fasilitas yang telah dibangun dapat diikuti dengan peningkatan daya tarik dan jangkauan destinasi. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah desa telah berjalan, tetapi masih memerlukan optimalisasi pada fasilitas pendukung dan promosi digital.

B. Peran Pemerintahan Desa Sebagai Mobilisator

Menurut teori peran Edy Suhardono (2016), peran sebagai mobilisator merupakan peran pemerintah sebagai pengarah dan penggerak masyarakat untuk melakukan tindakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco, peran mobilisator tidak hanya ditunjukkan melalui ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah desa dalam mengorganisasi kelompok masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi, serta membangun kelembagaan pengelolaan wisata. Berdasarkan desain wawancara, aspek mobilisator difokuskan pada bagaimana pemerintah desa menggerakkan masyarakat dan langkah yang dilakukan untuk memotivasi serta menumbuhkan semangat masyarakat dalam membangun wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang telah melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco. Pihak yang dilibatkan meliputi pengelola wisata/BUMDes, Karang Taruna, kelompok UMKM, pemuda desa, serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Pelibatan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti kerja bakti, rapat bersama, pelatihan, kegiatan kebersihan, pengelolaan fasilitas, kegiatan wisata, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha di sekitar lokasi wisata. Pelibatan berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengembangan wisata, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Ganggangpanjang dalam wawancara:

“Pemerintah desa berperan aktif menggerakkan masyarakat dengan mengadakan kerja bakti, pelatihan, dan rapat bersama. Kami juga melibatkan Karang Taruna dan kelompok UMKM untuk ikut mengelola kegiatan wisata. Dengan begitu masyarakat merasa dilibatkan secara langsung.”

Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Wisata

Gambar 2 memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ganggangpanjang. Keterlibatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan peran mobilisator karena pemerintah desa tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan yang mendukung pengembangan wisata. Partisipasi masyarakat, khususnya pemuda desa, juga terlihat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, pengelolaan fasilitas, dan aktivitas pendukung lainnya. Dokumentasi pada Gambar 2 dan Gambar 3 dengan demikian memperkuat hasil wawancara bahwa mobilisasi masyarakat dilakukan melalui dua aspek, yaitu penguatan kelembagaan sebagai wadah pengelolaan dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan wisata.

Selain melalui kegiatan sosial dan gotong royong, mobilisasi masyarakat juga dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan wisata. Pemerintah Desa Ganggangpanjang memberikan ruang kepada masyarakat untuk membuka lapak usaha di sekitar kawasan wisata. Kesempatan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam mendukung aktivitas wisata. Dengan demikian, mobilisasi yang dilakukan pemerintah desa tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi karena masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus memperoleh manfaat dari berkembangnya destinasi wisata.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata juga terlihat melalui pengelolaan area parkir yang melibatkan Karang Taruna Desa Ganggangpanjang. Berdasarkan data penelitian, pengelolaan parkir menggunakan sistem pembayaran secara sukarela, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp800.000 per hari pada hari biasa dan sekitar Rp1.500.000 per hari pada hari libur. Pendapatan tersebut dikelola oleh Karang Taruna dan dilaporkan kepada Kepala Desa secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang memberikan ruang kepada kelompok masyarakat untuk mengambil bagian secara langsung dalam aktivitas pendukung wisata. Pelibatan Karang Taruna dalam pengelolaan parkir juga menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada kelompok masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan wisata.

Selanjutnya, peran mobilisator Pemerintah Desa Ganggangpanjang juga terlihat melalui upaya penguatan kelembagaan BUMDes. Dalam pengelolaan Punden Mbah Reco, BUMDes menjadi salah satu lembaga yang mendukung pengelolaan wisata, sementara masyarakat tetap terlibat dalam pelaksanaan berbagai aktivitas di lapangan. Penguatan kelembagaan tersebut memperoleh dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melalui pendampingan serta proses penguatan legalitas kelembagaan. Dalam hal ini, Dinas PMD tidak berperan sebagai pihak utama dalam menggerakkan masyarakat, melainkan sebagai pihak pendukung yang memberikan arahan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan BUMDes.

Gambar 3. Proses Pembentukan Legalitas Bumdes Bersama Pihak-Pihak Terkait

Hal tersebut dapat dilihat pada dokumentasi di atas yang menunjukkan proses pembentukan dan penguatan legalitas BUMDes bersama pihak-pihak terkait. Dokumentasi tersebut memperlihatkan adanya dukungan Dinas PMD dalam proses penguatan kelembagaan BUMDes. Dukungan tersebut menjadi bagian yang melengkapi upaya Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam membangun kelembagaan yang dapat mendukung pengelolaan wisata secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Dinas PMD dalam proses tersebut memperkuat aspek kelembagaan, sedangkan fungsi utama dalam menggerakkan masyarakat tetap berada pada Pemerintah Desa Ganggangpanjang.

Jika dibandingkan dengan penelitian Karyana (2023), terdapat kesamaan bahwa pengembangan desa melalui BUMDes dan kelompok masyarakat membutuhkan keterlibatan masyarakat serta penguatan kapasitas kelompok agar potensi lokal dapat berkembang. Namun, penelitian Karyana lebih menekankan pada pemberdayaan dan pengembangan kelompok masyarakat melalui BUMDes, sedangkan penelitian ini menunjukkan peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai penggerak yang menghubungkan berbagai unsur masyarakat, seperti BUMDes, Karang Taruna, kelompok UMKM, pemuda, dan masyarakat sekitar dalam aktivitas pengembangan wisata. Sementara itu, penelitian Fazlin, Sopacua, dan Nahuaway (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi di Wisata Punden Mbah Reco, tetapi penelitian ini lebih menekankan pada posisi Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai mobilisator yang secara langsung menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam menjaga, mengelola, dan memperoleh manfaat dari keberadaan destinasi wisata.

Dengan demikian, hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang telah menjalankan peran sebagai mobilisator dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti, kegiatan wisata, pengembangan UMKM, pengelolaan parkir, serta penguatan kelembagaan BUMDes. Mobilisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, yaitu pengelola wisata/BUMDes, Karang Taruna, kelompok UMKM, pemuda desa, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, Dinas PMD berperan sebagai pihak pendukung melalui pendampingan dan penguatan legalitas kelembagaan BUMDes. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata dan terstruktur sehingga Pemerintah Desa Ganggangpanjang masih perlu memperkuat koordinasi, pembagian peran, serta keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan teori peran Edy Suhardono (2016), fungsi mobilisator telah dijalankan, tetapi masih diperlukan penguatan agar keterlibatan masyarakat dapat berlangsung secara lebih konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

C. Peran Pemerintahan Desa Sebagai Regulator

Menurut teori peran Edy Suhardono (2016), peran sebagai regulator merupakan peran pemerintah dalam menetapkan arah, aturan, dan ketentuan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban serta memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks penelitian ini, peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai regulator mencakup proses perumusan dan penerapan aturan pengelolaan Wisata Punden Mbah Reco, pengaturan aktivitas masyarakat dan pedagang, pengelolaan keuangan wisata, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan wisata. Desain wawancara penelitian juga secara khusus menanyakan mengenai keberadaan Peraturan Desa dan mekanisme pengawasan terhadap pembangunan serta program yang dilaksanakan di Punden Mbah Reco.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan Wisata Mbah Reco. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perdes tersebut mengatur pembagian tugas pengelola, kontribusi dana, serta aturan ketertiban. Pemerintah desa juga melakukan pengawasan melalui BUMDes dan tim pengelola agar kegiatan wisata berjalan secara tertib dan terarah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Ganggangpanjang dalam wawancara:

"Pemerintah desa sudah menetapkan peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan wisata Mbah Reco. Dalam peraturan tersebut diatur pembagian tugas pengelola, kontribusi dana, serta aturan ketertiban. Kami juga melakukan pengawasan rutin melalui BUMDes dan tim pengelola agar kegiatan wisata berjalan tertib dan terarah."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi regulator Pemerintah Desa Ganggangpanjang tidak hanya berkaitan dengan pembuatan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah desa memiliki ketentuan mengenai jam operasional wisata, penataan

pedagang, serta pengelolaan pendanaan. Pengawasan dilakukan melalui rapat evaluasi dan pemantauan langsung ke lapangan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan wisata

Gambar 4. Pengawasan dan pembinaan dari dinas pemberdayaan masyarakat (PMD)

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut juga didukung oleh dokumentasi kegiatan pengawasan dan pembinaan yang ditampilkan pada Gambar 4. Dokumentasi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan Pemerintah Desa bersama pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Wisata Punden Mbah Reco. Kehadiran kegiatan pengawasan memperlihatkan bahwa fungsi regulator tidak berhenti pada penetapan aturan, tetapi juga dilanjutkan melalui proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui BUMDes dan tim pengelola serta melalui evaluasi terhadap kegiatan wisata. Dengan demikian, dokumentasi tersebut menjadi bukti pendukung bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang menjalankan fungsi regulator melalui pengaturan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wisata.

Dalam pengaturan operasional, Wisata Punden Mbah Reco dibuka mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Pemerintah desa juga mengatur penempatan pedagang melalui pembagian area atau zona tertentu agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu akses pengunjung dan estetika kawasan. Pedagang tidak diperbolehkan berjualan di luar zona yang telah ditentukan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pengendalian aktivitas di kawasan wisata agar kepentingan pengunjung, pedagang, dan keberlanjutan kawasan dapat berjalan secara seimbang.

Selain pengaturan aktivitas wisata, Pemerintah Desa Ganggangpanjang juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan wisata. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan sumbangan sukarela dari pengunjung yang ditempatkan pada kotak di sekitar pintu masuk Punden Mbah Reco. Dana tersebut digunakan kembali untuk pemeliharaan dan pembaruan fasilitas publik serta pengadaan alat kebersihan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk memastikan bahwa sumber penerimaan dari aktivitas wisata dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung keberlanjutan destinasi.

Peran regulator juga terlihat dalam upaya menjaga nilai budaya dan kesakralan Punden Mbah Reco. Pemerintah desa menetapkan ketentuan mengenai perilaku pengunjung agar tetap sesuai dengan norma kesopanan dan adat masyarakat setempat. Beberapa bentuk pengaturan tersebut antara lain larangan melakukan tindakan asusila, membuang sampah sembarangan, serta berbicara kasar di kawasan Punden. Aturan tersebut penting karena Punden Mbah Reco tidak hanya berfungsi sebagai lokasi wisata, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat.

Penerapan aturan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM menyatakan:

“Pemerintah desa membuat aturan yang jelas tentang lokasi berjualan dan kebersihan. Kami wajib mengikuti ketentuan tersebut agar kawasan wisata tertib.”

Sementara itu, dari perspektif wisatawan, keberadaan aturan memberikan dampak terhadap kenyamanan kunjungan. Wisatawan menyampaikan bahwa kawasan wisata terlihat tertata, khususnya dalam pengaturan area parkir, tempat berjualan, dan kebersihan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Khair, Kafrawi, dan Sarkawi (2022), penelitian tersebut lebih menekankan pemanfaatan potensi BUMDes dan pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa. Sementara itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Ganggangpanjang menjalankan fungsi regulator secara lebih luas melalui pengaturan tata kelola kawasan wisata, pembagian tugas pengelola, pengaturan pedagang, pengelolaan kontribusi dana, jam operasional, serta perlindungan terhadap nilai budaya lokal. Selanjutnya, penelitian Fazlin, Sopacua, dan Nahuaway (2024) menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga identitas budaya serta mengembangkan destinasi wisata. Kesamaan tersebut terlihat dalam pengelolaan Punden Mbah Reco, khususnya dalam upaya Pemerintah Desa Ganggangpanjang menjaga nilai sejarah, budaya, dan kesakralan kawasan wisata melalui aturan yang diterapkan kepada masyarakat dan wisatawan.

Dengan demikian, berdasarkan teori Edy Suhardono (2016), Pemerintah Desa Ganggangpanjang telah menjalankan peran sebagai regulator melalui penetapan Perdes, pengaturan tata kelola wisata, pengaturan jam operasional, penataan pedagang, pengawasan pengelolaan keuangan, serta perlindungan terhadap nilai budaya dan kesakralan Punden Mbah Reco. Namun, berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas regulasi tertulis, mekanisme pengawasan, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan Punden Mbah Reco tidak hanya berjalan berdasarkan kesepakatan dan aturan operasional, tetapi memiliki sistem tata kelola yang lebih jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kesimpulan penelitian bahwa peran regulator telah dilaksanakan, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek regulasi tertulis, mekanisme pengawasan, dan sanksi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa berdasarkan teori peran Edy Suhardono yang meliputi fasilitator, mobilisator, dan regulator telah dijalankan dalam mendukung pengembangan destinasi wisata. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, serta perencanaan pengembangan wisata, meskipun aspek promosi digital dan pengembangan fasilitas pendukung masih perlu dioptimalkan. Peran sebagai mobilisator terlihat melalui upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung pengembangan UMKM, tetapi partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pihak belum sepenuhnya merata dan terstruktur. Sementara itu, peran sebagai regulator telah dilaksanakan melalui penerapan aturan dan kesepakatan dalam pengelolaan kawasan wisata, namun masih diperlukan regulasi tertulis, mekanisme pengawasan, dan sanksi yang lebih jelas. Dengan demikian, ketiga peran pemerintah desa telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan Wisata Punden Mbah Reco, tetapi pengelolannya masih perlu diperkuat melalui optimalisasi promosi berbasis digital, peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyempurnaan tata kelola dan regulasi agar pengembangan wisata dapat berlangsung secara tertib, partisipatif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Ganggangpanjang yang telah memberikan izin, informasi, dan dukungan selama proses penelitian mengenai pengembangan Wisata Punden Mbah Reco. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola Wisata Punden Mbah Reco, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, pelaku UMKM, serta masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] M. Y. Syaifudin And M. F. Ma'ruf, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)," *Publika*, Vol. 10, No. 2, Pp. 365–380, Jan. 2022, Doi: 10.26740/Publika.V10n2.P365-380.
- [2] V. Dorongsihae, S. Sambiran, And F. Pangemanan, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan," *Governance*, Vol. 2, No. 1, P. 3, 2022, [Online]. Available: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0camqw7ajahckewjghs3-7v_8ahuaaaahqaaaaqag&url=https%3a%2f%2fejournal.unsrat.ac.id%2findex.php%2fgovernance%2farticle%2fdownload%2f41449%2f36847&psig=Aovvaw2g3g3ser8r60mqiv
- [3] D. Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *J. Huk. Pembang.*, Vol. 50, No. 1, P. 245, 2020, Doi: 10.21143/Jhp.Vol50.No1.2493.
- [4] A. Hidayat, "Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *J. Inov. Penelit.*, Vol. 3, No. 6, Pp. 6707–6714, 2022.
- [5] H. Fadilla, "Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia," *Benefit J. Bussiness, Econ. Financ.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 36–43, 2024, Doi: 10.37985/Benefit.V2i1.375.
- [6] R. Amalia, A. Aziz, A. Syatori, And E. W. Dewi, "Pengembangan Objek Wisata Sumur Tujuh Cikajayaan Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga," *Jetour J. Sharia Tour. Hosp.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 31–41, 2023, [Online]. Available: <https://jetour.syekhnurjati.id/>
- [7] B. Pranoto, T. Utami, And Y. Sunesti, "Pengembangan Desa Wisata Berjo Menuju Sdgs Desa Mandiri Dan Berkelanjutan," *J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, Vol. 12, No. 2, Pp. 381–395, 2023, Doi: 10.23887/Jish.V12i2.61185.
- [8] J. Khotimah And A. Pawestri, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai," *J. Pamator J. Ilm. Univ. Trunojoyo*, Vol. 15, No. 2, Pp. 181–196, Oct. 2022, Doi: 10.21107/Pamator.V15i2.17626.
- [9] D. M. Soeswoyo, "Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Realisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota," *J. Sos. Hum.*, Vol. 10, No. 2, P. 108, Nov. 2019, Doi: 10.30997/Jsh.V10i2.2024.
- [10] F. Farida, M. Wanialisa, Nursina, Ruwaida, And Wahyuni, "Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Mewujudkan Desa Mandiri," *J. Kraith-Abdimas*, Vol. 4, No. 1, Pp. 65–73, 2021.

- [11] M. Misrah And M. Tamrin, “Analisis Kolaborasi Pemerintahan Desa Terhadap Komitmen Organisasi Pada Masyarakat Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan,” *J. Manaj. Dan Ekon. Terap.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 106–114, 2023, Doi: 10.35914/Jmet.V1i2.64.
- [12] I. G. E. P. S. Sentanu And M. Mahadiansar, “Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan,” *J. Ilmu Adm. Negara*, Vol. 8, No. 1, Pp. 1–20, Jun. 2020, Doi: 10.31629/Juan.V8i1.1879.
- [13] I. G. E. P. S. Sentanu, Y. A. Tirani, And G. A. S. Pradono, *Kolaborasi & Analisis Stakeholder*, Pertama. Malang: Ub Press, 2024.
- [14] Bunga Sintia And Nurhayati, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal,” *J. Din. Sos. Dan Sains*, Vol. 2, No. 1, Pp. 396–401, 2025, Doi: 10.60145/Jdss.V2i1.111.
- [15] A. Khair, K. Kafrawi, And S. Sarkawi, “Pemanfaatan Potensi Bumdes Sbagai Upaya Meningkatkan Apbdes Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat,” *J. Kompil. Huk.*, Vol. 7, No. 2, Dec. 2022, Doi: 10.29303/Jkh.V7i2.123.
- [16] Y. Karyana, “Inovasi Pemberdayaan Bumdes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa,” *Populika*, Vol. 11, No. 1, Pp. 41–49, Jan. 2023, Doi: 10.37631/Populika.V11i1.731.
- [17] Fazlin, Y. Sopacua, And Y. Nahuaway, “Identitas Budaya Dalam Politik Pariwisata : Promosi Strategis Gua Laulawi Oleh Otoritas Lokal,” *Popul. J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, Vol. 18, No. 2, Pp. 221–237, 2024.
- [18] G. L. Sukma, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang,” *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, Vol. 10, No. 2, Pp. 445–461, 2024.
- [19] D. Saputra, “Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat,” *Gov. J. Ilmu Pemerintah.*, Vol. 13, Pp. 85–97, 2020, Doi: 10.31947/Jgov.V13i2.10741.
- [20] F. Gusriza, “Analisis Potensi Objek Daya Tarik Wisata Di Kawasan Saribu Rumah Gadang,” *J. Pariwisata*, Vol. 9, No. 1, Pp. 37–44, 2022, Doi: 10.31294/Par.V9i1.10003.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.